



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 8 No 2 November 2025

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 114 - 124

PERAN PEMERINTAH DAERAH MALUKU DALAM PENGELOLAAN KONFLIK SOSIAL

Josephus Noya

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia Maluku

email: josephusnoya28@gmail.com

Abstract

This study analyzes the role of the Maluku regional government in managing the social conflict that occurred in the region. The communal conflict that erupted in Maluku from 1999 to 2004 resulted in thousands of casualties and hundreds of thousands of internally displaced persons. This study uses a qualitative approach with a case study method to examine the strategies, policies, and effectiveness of the local government in managing the social conflict. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and analysis of policy documents. The results indicate that the Maluku regional government has implemented various conflict management strategies, including the establishment of interfaith dialogue forums, community reconciliation programs, and the development of socio-economic infrastructure. However, the effectiveness of conflict management still faces challenges related to inter-agency coordination, limited resources, and the complexity of the conflict's root causes. This research contributes to an understanding of the dynamics of local conflict and the role of local government in building sustainable peace.

Keywords: Social Conflict; Local Government; Maluku; Conflict Management; Reconciliation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah daerah Maluku dalam pengelolaan konflik sosial yang terjadi di wilayah tersebut. Konflik komunal yang meletus di Maluku pada tahun 1999-2004 mengakibatkan ribuan korban jiwa dan ratusan ribu pengungsi internal. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji strategi, kebijakan, dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola konflik sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara

mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Maluku telah mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan konflik, termasuk pembentukan forum dialog lintas agama, program rekonsiliasi komunitas, dan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi. Namun, efektivitas pengelolaan konflik masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas akar masalah konflik. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika konflik lokal dan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perdamaian berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Sosial; Pemerintah Daerah; Maluku; Pengelolaan Konflik; Rekonsiliasi

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena kompleks yang dapat mengancam stabilitas dan pembangunan suatu daerah. Dalam konteks Indonesia, konflik komunal yang terjadi di berbagai wilayah pasca-reformasi menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik yang efektif dan berkelanjutan. Arjon (2018) menekankan bahwa pengelolaan konflik yang efektif memerlukan kolaborasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat melalui tiga strategi utama: perancangan mekanisme peringatan dini yang efektif, implementasi kebijakan pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian pasca-konflik, serta partisipasi aktor non-negara dalam pengelolaan konflik.

Provinsi Maluku mengalami konflik komunal yang berkepanjangan antara tahun 1999-2004, yang mengakibatkan dampak devastatif bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Bertrand (2004) mencatat bahwa konflik ini berakar pada kompleksitas hubungan antar-etnis dan agama yang telah terbentuk sepanjang sejarah, diperkuat oleh faktor-faktor politik dan ekonomi kontemporer. Konflik yang dimulai dengan insiden kecil di Ambon pada Januari 1999 kemudian meluas ke berbagai pulau di Maluku, melibatkan komunitas Kristen dan Muslim dalam kekerasan berkepanjangan yang mengancam keutuhan sosial provinsi tersebut.

Duncan (2013) dalam studinya tentang kekerasan dan balas dendam di Indonesia Timur menjelaskan bahwa konflik di Maluku tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik agama, melainkan sebagai manifestasi dari ketegangan struktural yang lebih mendalam. Faktor-faktor seperti kompetisi

sumber daya, marginalisasi ekonomi, dan manipulasi politik telah berkontribusi terhadap eskalasi konflik. Perspektif ini sejalan dengan analisis Stewart (2002) yang mengidentifikasi ketimpangan horizontal sebagai sumber utama konflik, di mana perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi dan politik antar-kelompok dapat memicu ketegangan sosial.

Dalam konteks pengelolaan konflik, Thomas dan Kilmann (1974) mengembangkan kerangka teoritis yang mengidentifikasi lima gaya pengelolaan konflik berdasarkan dimensi asertivitas dan kerjasama: kompetisi, akomodasi, penghindaran, kompromi, dan kolaborasi. Andayana et al. (2024) dalam penelitiannya tentang penerapan strategi pengelolaan konflik dalam sengketa pasca-pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemimpin tradisional dan otoritas desa terbukti paling efektif dalam mencapai rekonsiliasi berkelanjutan. Temuan ini relevan dengan konteks Maluku, di mana sistem kepemimpinan tradisional memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat adat.

Shih dan Susanto (2010) dalam penelitiannya terhadap 228 pegawai pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap gaya pengelolaan konflik, khususnya gaya integrasi dan kompromi. Studi ini menunjukkan bahwa gaya integrasi memiliki efek langsung terhadap kinerja kerja dan berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik yang efektif.

Kase et al. (2018) dalam studinya tentang pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan konflik perbatasan Indonesia-Timor Leste mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia memiliki korelasi positif namun moderat dengan pengelolaan konflik, dengan pengaruh sebesar 33,5%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tokoh adat yang tinggal di wilayah konflik sangat mendukung penggunaan hukum/sumpah adat sebagai alternatif kebijakan dalam pengelolaan konflik, namun saran tersebut masih kurang mendapat respons yang baik dari pemerintah. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi sistem nilai lokal dalam strategi pengelolaan konflik pemerintah daerah.

International Crisis Group (2002) dalam laporannya tentang pencarian perdamaian di Maluku mengidentifikasi bahwa kegagalan awal dalam penanganan konflik disebabkan oleh ketidaknetralan aparat keamanan, di mana personel militer dan polisi lokal rentan terhadap 'kontaminasi' atau keberpihakan

terhadap komunitas agama mereka sendiri. Pembentukan Batalyon Gabungan (Yon Gab) sebagai pasukan cadangan mobile yang ditarik dari pasukan elit ketiga angkatan berkontribusi terhadap penurunan kekerasan, meskipun reputasinya ternoda oleh tuduhan brutalitas yang memperburuk antagonisme Muslim.

Galtung (1969) dalam teorinya tentang kekerasan, perdamaian, dan penelitian perdamaian membedakan antara kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Dalam konteks Maluku, kekerasan langsung yang termanifestasi dalam bentuk pembunuhan dan perusakan properti hanya merupakan puncak gunung es dari kekerasan struktural dan kultural yang telah mengakar dalam masyarakat. Panggabean (2006) menekankan pentingnya pendidikan untuk menangani konflik dan menghindari kekerasan, yang mengharuskan transformasi struktur dan budaya yang mendukung kekerasan menjadi struktur dan budaya yang mendukung perdamaian.

Studi tentang dampak ekonomi konflik di Maluku menunjukkan konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Analisis menggunakan metode kontrol sintesis mengungkapkan bahwa kesenjangan antara Maluku sintesis dan Maluku aktual melebar hingga lebih dari ukuran ekonomi Maluku aktual pada tahun 1999, yang berarti ekonomi aktual kurang dari setengah dari apa yang seharusnya bisa dicapai. Pada tahun 2011, kesenjangan antara kedua Maluku telah meningkat menjadi 60,3% dari ekonomi Maluku aktual (The Conversation, 2017). Temuan ini menunjukkan bahwa persistensi kekerasan berdampak jangka panjang terhadap pemulihan ekonomi daerah.

Shapiro dan Kinon (2010) mengembangkan 'Prinsip Pencegahan' sebagai kerangka pragmatis untuk mencegah konflik destruktif. Kerangka ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan yang sistematis dan terstruktur dalam mengelola potensi konflik sebelum mencapai tahap kekerasan. Dalam konteks pemerintah daerah, implementasi prinsip pencegahan memerlukan sistem deteksi dini yang efektif, koordinasi antar-lembaga yang kuat, dan kapasitas respons yang memadai.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah Maluku dalam pengelolaan konflik sosial, dengan fokus pada strategi, implementasi kebijakan, dan efektivitas pengelolaan konflik. Studi ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya membangun perdamaian berkelanjutan di Maluku. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman tentang dinamika konflik lokal dan pembelajaran best

practices pengelolaan konflik yang dapat diterapkan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji peran pemerintah daerah Maluku dalam pengelolaan konflik sosial. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat kompleks dan kontekstual dari fenomena konflik sosial yang memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika, proses, dan makna di balik tindakan para aktor yang terlibat (Yin, 2003). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara intensif suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Ghauri & Firth, 2009).

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Maluku, dengan fokus pada Kota Ambon dan beberapa kabupaten yang terdampak konflik komunal tahun 1999-2004. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah-wilayah tersebut merupakan episentrum konflik dan telah mengimplementasikan berbagai strategi pengelolaan konflik pasca-konflik. Periode penelitian dilakukan selama 8 bulan, dari Maret hingga Oktober 2024, untuk memungkinkan pengumpulan data yang komprehensif dan triangulasi dari berbagai sumber.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) pejabat pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam pengelolaan konflik, (2) tokoh masyarakat dan pemimpin agama yang berperan dalam proses rekonsiliasi, (3) akademisi dan peneliti yang memiliki expertise dalam isu konflik Maluku, dan (4) anggota masyarakat yang menjadi korban dan saksi konflik. Total informan yang diwawancarai sebanyak 32 orang, terdiri dari 12 pejabat pemerintah daerah, 8 tokoh masyarakat dan pemimpin agama, 6 akademisi, dan 6 anggota masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas konstruk dan menghasilkan temuan yang lebih kaya dan akuntabel (Jick, 1979). Data primer dikumpulkan melalui: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang telah divalidasi, (2) observasi partisipatif terhadap kegiatan dialog lintas agama dan program rekonsiliasi, dan (3) focus group discussion (FGD) dengan kelompok masyarakat yang terdampak konflik. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen

kebijakan, laporan pemerintah, publikasi akademik, dan laporan media massa terkait konflik dan pengelolaannya di Maluku.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten tematik yang dikombinasikan dengan analisis jaringan sosial (social network analysis) untuk memahami peran berbagai stakeholder dalam pengelolaan konflik. Proses analisis mengikuti tahapan: (1) transkripsi dan kodifikasi data mentah, (2) identifikasi tema dan pola dari data, (3) kategorisasi dan abstraksi temuan, (4) triangulasi antar-sumber data, dan (5) interpretasi dan verifikasi temuan. Software NVivo 12 digunakan untuk membantu proses kodifikasi dan analisis data kualitatif.

Untuk memastikan rigor metodologis, penelitian ini menerapkan beberapa strategi validasi: (1) triangulasi sumber data untuk konfirmasi temuan dari berbagai perspektif, (2) member checking dengan informan kunci untuk validasi interpretasi, (3) peer debriefing dengan sesama peneliti untuk menguji konsistensi analisis, dan (4) audit trail untuk dokumentasi proses penelitian yang transparan. Pertimbangan etis penelitian meliputi informed consent dari semua informan, penjaminan kerahasiaan identitas, dan sensitivitas terhadap trauma konflik yang mungkin masih dialami oleh beberapa informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengelolaan Konflik Pemerintah Daerah Maluku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Maluku telah mengembangkan strategi pengelolaan konflik yang multi-dimensi, mencakup aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca-konflik. Strategi utama yang diimplementasikan meliputi: (1) pembentukan forum dialog lintas agama dan etnis, (2) program rekonsiliasi komunitas berbasis kearifan lokal, (3) pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi untuk mengurangi ketimpangan, (4) penguatan sistem peringatan dini konflik, dan (5) capacity building aparatur pemerintah dalam pengelolaan konflik.

Forum Dialog Lintas Agama dan Etnis menjadi instrumen utama dalam memfasilitasi komunikasi dan membangun kepercayaan antar-komunitas. Forum ini melibatkan pemimpin agama Kristen, Islam, dan kepercayaan lokal, serta tokoh adat dari berbagai etnis di Maluku. Mekanisme dialog ini sejalan dengan temuan Arjon (2018) yang menekankan pentingnya partisipasi aktor non-negara

dalam pengelolaan konflik. Dalam praktiknya, forum ini mengadakan pertemuan rutin bulanan dan pertemuan darurat ketika muncul potensi ketegangan.

Program rekonsiliasi komunitas berbasis kearifan lokal memanfaatkan sistem nilai tradisional Maluku seperti konsep 'Pela' dan 'Gandong' yang mengatur hubungan persaudaraan antar-negeri (desa). Program ini melibatkan ritual-ritual adat untuk pemulihan hubungan yang rusak akibat konflik, termasuk upacara 'panas pela' untuk memperkuat ikatan persaudaraan. Pendekatan ini mendukung temuan Kase et al. (2018) yang menunjukkan bahwa tokoh adat sangat mendukung penggunaan hukum adat sebagai alternatif kebijakan dalam pengelolaan konflik.

Pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi kantong konflik, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan menciptakan interdependensi ekonomi antar-komunitas. Program ini mencakup pembangunan pasar terpadu, sentra industri kecil bersama, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan analisis Stewart (2002) tentang pentingnya mengatasi ketimpangan horizontal sebagai sumber konflik.

Efektivitas dan Tantangan Pengelolaan Konflik

Evaluasi efektivitas pengelolaan konflik menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada aspek positif, tidak terjadi lagi kekerasan komunal berskala besar sejak implementasi strategi pengelolaan konflik. Forum dialog lintas agama berhasil mencegah eskalasi beberapa insiden potensial menjadi konflik terbuka. Program rekonsiliasi berbasis kearifan lokal juga menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat, dengan lebih dari 80% respondent FGD menyatakan program ini efektif dalam memulihkan hubungan sosial.

Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam pengelolaan konflik. Pertama, masalah koordinasi antar-lembaga masih menjadi kendala utama. Berbagai instansi pemerintah daerah seringkali memiliki program yang tumpang tindih atau bahkan kontradiktif dalam penanganan isu-isu sensitif. Kedua, keterbatasan sumber daya finansial dan SDM yang kompeten dalam pengelolaan konflik membatasi implementasi program-program yang telah dirancang. Ketiga, kompleksitas akar masalah konflik yang melibatkan dimensi historis, ekonomi, politik, dan sosial-budaya memerlukan pendekatan jangka panjang yang seringkali tidak sejalan dengan siklus politik lokal.

Temuan penelitian juga mengungkap pentingnya faktor kepemimpinan dalam keberhasilan pengelolaan konflik. Pemimpin daerah yang memiliki legitimasi tinggi dan kemampuan membangun consensus antar-komunitas terbukti lebih efektif dalam mengimplementasikan strategi pengelolaan konflik. Hal ini

sejalan dengan temuan Shih dan Susanto (2010) tentang pentingnya kecerdasan emosional pemimpin dalam pengelolaan konflik yang efektif.

Inovasi dan Adaptasi dalam Pengelolaan Konflik

Pemerintah daerah Maluku telah mengembangkan beberapa inovasi dalam pengelolaan konflik yang dapat menjadi model bagi daerah lain. Pertama, sistem peringatan dini berbasis komunitas yang melibatkan jaringan informan di tingkat RT/RW untuk mendeteksi potensi ketegangan sejak dini. Sistem ini dilengkapi dengan protokol respons cepat yang memungkinkan intervensi dalam 24 jam pertama setelah deteksi potensi konflik.

Kedua, pendekatan 'peace journalism' yang bekerja sama dengan media lokal untuk memastikan pemberitaan yang tidak memihak dan tidak provokatif. Program ini melibatkan pelatihan jurnalis tentang sensitive reporting dan established standard operating procedures untuk pemberitaan isu-isu sensitif. Ketiga, pengembangan 'peace education' dalam kurikulum pendidikan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan pengelolaan konflik konstruktif dalam sistem pendidikan formal dan non-formal.

Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa implikasi kebijakan dan rekomendasi dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan konflik di Maluku. Pertama, perlu dibentuk lembaga koordinasi khusus yang bertugas mengintegrasikan seluruh program pengelolaan konflik dari berbagai instansi. Lembaga ini harus memiliki otoritas yang jelas dan didukung oleh regulasi yang memadai.

Kedua, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik perlu ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi. Ketiga, perlu dikembangkan indikator dan sistem monitoring-evaluasi yang komprehensif untuk mengukur efektivitas program pengelolaan konflik secara berkala. Keempat, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konflik melalui pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dan pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Maluku telah mengembangkan strategi pengelolaan konflik yang komprehensif dan multi-dimensi dalam merespons konflik komunal yang terjadi pada periode 1999-2004. Strategi yang diimplementasikan mencakup pembentukan forum dialog lintas

agama, program rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi, sistem peringatan dini, dan pengembangan kapasitas aparaturnya pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka teoritis pengelolaan konflik yang menekankan pentingnya strategi preventif, responsif, dan pemulihan dalam siklus pengelolaan konflik.

Efektivitas pengelolaan konflik menunjukkan hasil yang positif dalam pencegahan kekerasan komunal berskala besar dan pemulihan hubungan sosial antar-komunitas. Forum dialog lintas agama terbukti efektif dalam mencegah eskalasi ketegangan menjadi konflik terbuka, sementara program rekonsiliasi berbasis kearifan lokal mendapat penerimaan tinggi dari masyarakat. Namun, tantangan signifikan masih dihadapi dalam hal koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas akar masalah konflik yang memerlukan pendekatan jangka panjang.

Inovasi dalam pengelolaan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Maluku, seperti sistem peringatan dini berbasis komunitas, pendekatan *peace journalism*, dan integrasi *peace education* dalam kurikulum lokal, dapat menjadi model yang dapat diadaptasi oleh daerah lain dengan karakteristik konflik serupa. Kepemimpinan yang memiliki legitimasi tinggi dan kemampuan membangun konsensus antar-komunitas terbukti menjadi faktor kritis dalam keberhasilan implementasi strategi pengelolaan konflik.

Rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan konflik meliputi pembentukan lembaga koordinasi khusus, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM, pengembangan sistem monitoring-evaluasi yang komprehensif, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan konflik. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang peran pemerintah daerah dalam pengelolaan konflik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta praktik pengelolaan konflik di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus geografis yang terbatas pada Provinsi Maluku dan pendekatan metodologis yang bersifat kualitatif. Penelitian mendatang dapat mengembangkan studi komparatif dengan daerah lain yang mengalami konflik serupa atau menggunakan pendekatan *mixed-methods* untuk validasi temuan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian longitudinal dapat dilakukan untuk mengkaji sustainability strategi pengelolaan konflik dalam jangka panjang.

REFERENSI

- Ackermann, A. (2003). The idea and practice of conflict prevention. *Journal of Peace Research*, 40(3), 339-347.
- Andayana, M. N. D., Holivil, E., & Fallo, A. R. (2024). Applying conflict management strategies in post-election disputes in Lamaksenu Village, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(3), 385-398. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.385-398>
- Arjon, S. S. (2018). Conflict management in Indonesia: Policy perspective and analysis. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 8(1), 12-26. <https://doi.org/10.14203/jissh.v8i1.88>
- Bertrand, J. (2004). *Nationalism and ethnic conflict in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Duncan, C. R. (2013). *Violence and vengeance: Religious conflict and its aftermath in eastern Indonesia*. Cornell University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.
- Ghuri, P., & Firth, R. (2009). The formalization of case study research in international business. *Der Markt*, 48(1), 29-40.
- International Crisis Group. (2002). *Indonesia: The search for peace in Maluku*. ICG Asia Report No. 31. <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-search-peace-maluku>
- Jick, T. D. (1979). Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. *Administrative Science Quarterly*, 24(4), 602-611.
- Kase, P., Tamunu, L. M., Oiladang, C. E., & Tadeus, D. W. (2018). The influence of government policy on the management of border conflict between Indonesia and Oecusse District, Timor Leste. *International Journal of Engineering and Technology*, 7(4.38), 932-938. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.38.27612>
- Panggabean, S. R. (2006). Educating to handle conflict and avoid violence. In C. A. Coppel (Ed.), *Violent conflicts in Indonesia: Analysis, representation, resolution* (pp. 217-228). Routledge.
- Shapiro, D., & Kinon, A. (2010). The prevention principle: A pragmatic framework to prevent destructive conflict. *Journal of International Dispute Settlement*, 1(2), 301-312.

- Shih, H., & Susanto, E. (2010). Conflict management styles, emotional intelligence, and job performance in public organizations. *International Journal of Conflict Management*, 21(2), 147-168. <https://doi.org/10.1108/10444061011037387>
- Stewart, F. (2002). Horizontal inequalities as a source of conflict. In F. O. Hampson & D. M. Malone (Eds.), *From reaction to conflict prevention: Opportunities for the UN System* (pp. 105-138). Lynne Rienner Publishers.
- The Conversation. (2017, February 5). Local conflict and the economy: What can we learn from Indonesia's Maluku? <https://theconversation.com/local-conflict-and-the-economy-what-can-we-learn-from-indonesias-maluku-87010>
- Thomas, K. W., & Kilmann, R. H. (1974). *Thomas-Kilmann conflict mode instrument*. Xicom.
- Yin, R. K. (2003). *Case study research: Design and methods* (3rd ed.). Sage Publications.